

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah harus mengupayakan kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perkembangan roda pemerintahan saat ini menuntut segala hal yang mengutamakan efisiensi, baik waktu maupun sumber daya manusia.

Dalam upaya mendekatkan pemerintah dengan masyarakat maka alternatif yang dipakai adalah melalui upaya desentralisasi sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Upaya desentralisasi tersebut telah dilakukan melalui pemberian otonomi oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota atau desa serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125).

Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah lebih leluasa untuk mengatur pemerintahan di daerahnya. Seperti halnya pemerintah daerah Kabupaten Blitar yang semakin menggalakkan pembangunan daerah. Dalam proses pelaksanaan

pembangunan daerah, akan ada pemindahan kantor pusat pemerintahan di Kecamatan Kanigoro. Dengan pemindahan ibukota Kabupaten Blitar ke Kecamatan Kanigoro, diharapkan pengembangan wilayah Kabupaten Blitar dapat lebih optimal (Noegroho, 2009).

Kecamatan Kanigoro diajukan sebagai calon ibukota karena lokasinya yang sangat strategis sebagai ibukota. Menurut H. Harry Noegroho, SE, MH(2009): “Kecamatan Kanigoro berada di tengah-tengah batas administrasi Kabupaten Blitar dan aksesibilitasnya sangat baik. Selain itu, Kecamatan Kanigoro dipilih sebagai calon ibukota karena terletak di luar jalur aliran lahar Gunung Kelud di bagian utara kabupaten. Hal tersebut dimaksudkan agar ibukota kabupaten bisa relatif aman jika terjadi letusan Gunung Kelud dan terletak cukup jauh dari dataran banjir Sungai Brantas”. Selain itu, sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 3 tahun 2010, tentang pemindahan ibu kota Kabupaten Blitar dari wilayah Kota Blitar ke wilayah Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Atas dasar tersebut, pemerintah Kabupaten Blitar mengadakan pemindahan kantor Pemerintah Kabupaten Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 6).

Keberadaan kantor Pemerintah Kabupaten Blitar yang selama ini terletak di wilayah Kota Blitar, dianggap kurang memadai untuk mendukung kebijakan pembangunan dan pelayanan masyarakat di berbagai bidang. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian secara seksama dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan (*stakeholders*). Ibu Kota Kabupaten Blitar beserta kantor Pemerintahannya yang saat ini berada di wilayah Kota Blitar perlu

dipindahkan ke Kecamatan Kanigoro yang berada di wilayah Kabupaten Blitar (PP RI No.3, 2010). Atas alasan tersebut, dibutuhkan kantor pemerintahan yang dapat menjadi tempat berlangsungnya roda pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, sekaligus dapat menjadi suatu pusat kegiatan sosial maupun ekonomi yang dapat meningkatkan kualitas kawasan Kabupaten Blitar. Dalam al-Qur'an surat al-Anbiyaa' ayat 73 mengatakan:

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴿٧٣﴾

“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah.” (QS al-Anbiyaa' [21]: 73).

Dalam surat al-Anbiyaa' ayat 73 menjelaskan bahwasannya pemimpin-pemimpin seharusnya dapat memberi petunjuk serta menjadi contoh atau teladan bagi rakyatnya. Dalam ayat di atas, Allah juga memerintahkan para pemimpin mengerjakan suatu kebajikan. Dengan selalu melakukan suatu kebajikan, maka dalam pemerintahannya para pemimpin seharusnya dapat lebih terbuka kepada masyarakat. Keinginan pemerintah untuk menjalankan pemerintahan yang terbuka kepada masyarakat, menjadi dasar untuk membangun kantor Pemerintahan Kabupaten Blitar yang lebih terbuka dan dapat melayani seluruh elemen masyarakat secara efektif dan efisien.

Kantor Pemerintah Kabupaten Blitar yang baru, seharusnya dapat mencerminkan arsitektur lokal (Jawa) daerah Kabupaten Blitar, sehingga dapat

menjadi *land mark/icon* kawasan dengan bangunan yang dapat beradaptasi dan berdampingan dengan lingkungan sekitar sehingga manusia yang ada di dalamnya merasa nyaman. Atas alasan tersebut, tema yang akan diambil adalah “*Sustainable Architecture*”. Yaitu perancangan kantor pemerintah dengan mengambil unsur-unsur arsitektur lokal daerah Kabupaten Blitar dengan pemerhatian terhadap unsur sains arsitektur. Pengambilan tema juga didasarkan dalam al-Qur’an surat al-A’raaf ayat 56 sebagai berikut:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (QS Al-A’raaf [7]: 56).

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya Allah melarang umat manusia berbuat kerusakan di bumi. Pada dasarnya, Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi mempunyai tujuan yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Berdasarkan ayat di atas, maka tema yang diambil adalah *Sustainable Architecture*. Dengan tema *Sustainable Architecture* diharapkan pembangunan kantor Pemerintah Kabupaten Blitar tidak menimbulkan kerusakan pada lingkungan yang ada di sekitarnya.

Pembangunan kantor Pemerintah Kabupaten Blitar yang berada di Kecamatan Kanigoro dengan tema “*Sustainable Architecture*” diharapkan dapat menjadi tempat berlangsungnya roda pemerintahan yang lebih efektif dan efisien,

sekaligus dapat menjadi suatu pusat kegiatan sosial maupun ekonomi yang dapat meningkatkan kualitas kawasan. Sehingga pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Blitar menjadi lebih baik. Keberadaan kantor Pemerintah Kabupaten Blitar yang baru ini, diharapkan juga menjadi awal pembangunan daerah di Kabupaten Blitar pada umumnya serta Kecamatan Kanigoro dan sekitarnya pada khususnya.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam perancangan kantor Pemerintah Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana rancangan kantor Pemerintah Kabupaten Blitar menjadi tempat berlangsungnya roda pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, sekaligus dapat menjadi suatu pusat kegiatan sosial maupun ekonomi yang dapat meningkatkan kualitas kawasan?
2. Bagaimana menerapkan tema *Sustainable Architecture* pada rancangan kantor Pemerintah Kabupaten Blitar?

1.3. Tujuan

Dalam pengkajian, penyusunan, dan pembahasan tentang perancangan kantor Pemerintah Kabupaten Blitar memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, diantaranya adalah:

1. Menciptakan kantor Pemerintah Kabupaten Blitar menjadi sebuah tempat berlangsungnya roda pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, sekaligus dapat menjadi suatu pusat kegiatan sosial maupun ekonomi yang dapat meningkatkan kualitas kawasan.
2. Menciptakan kantor Pemerintah Kabupaten Blitar dengan menerapkan tema *Sustainable Architecture*.

1.4. Manfaat

Manfaat perancangan obyek ini adalah sebagai berikut:

- Bagi penulis sendiri:
 1. Dapat merancang kantor Pemerintahan Kabupaten Blitar dengan tema *Sustainable Architecture*.
 2. Memperoleh pengetahuan tentang sains bangunan dan lingkungan.
 3. Mengetahui sarana dan prasarana yang ada di gedung pemerintah kabupaten.
- Bagi masyarakat:
 1. Memiliki wadah kegiatan pemerintahan.
- Bagi pemerintah Kabupaten Blitar:
 1. Dapat memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat.

2. Dapat menjalankan roda pemerintahan secara efisien dan efektif, baik dalam hal tenaga, biaya, dan waktu.

1.5. Batasan

Adapun batasan-batasan dalam perancangan kantor Pemerintah Kabupaten Blitar agar ruang lingkup permasalahan tidak meluas adalah sebagai berikut:

1. Lokasi berada di Jl. Kusuma Bangsa, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2010, tentang pemindahan ibu kota Kabupaten Blitar dari wilayah Kota Blitar ke wilayah Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur.
2. Perancangan kantor Pemerintah Kabupaten Blitar sesuai dasar RDTRK Kecamatan Kanigoro tahun 2009-2029 tentang peraturan-peraturan bangunan di wilayah perkantoran dan gedung pemerintahan.
3. Perancangan kantor Pemerintah Kabupaten Blitar dengan tema *Sustainable Architecture* yang menitik beratkan pada arsitektur lokal dan sains arsitektur.